PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Supriyadi No. 07 Nganjuk Kode Pos 64412 Telp/Fax. (0358) 3550772
Email : dinsospppa@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 188/ 064 /K/411.403/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk, diperlukan alat alat berupa Indikator Kinerja Individu;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud bertujuan untuk :

a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan, sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

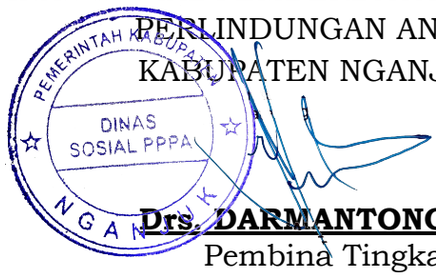
KETIGA : Indikator Kinerja Individu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dimanfaatkan untuk :

a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah;
c. Penetapan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah;
e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN NGANJUK



Drs. DARMANTONO
Pembina Tingkat I
NIP. 19680421 199403 1 010

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2024-2026

1. PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2. JABATAN : KEPALA DINAS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3. TUGAS : Menetapkan Kebijakan Teknis, Menyelenggarakan Kebijakan Teknis, Evaluasi dan Pelaporan serta Menyelenggarakan Tugas di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase Jumlah PMKS/ PPKS yang Tertangani	**a) Konsep :** Jumlah PMKS/ PPKS yang Tertangani	Renja Dinas Sosial PPPA Tahun 2024	
		b) Definisi Operasional : Jumlah PMKS/PPKS yang Tertangani setiap bulan yang ada di Kabupaten Nganjuk berdasarkan pendataan yang dilakukan		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah PMKS/PPKS yang Tertangani : Jumlah PMKS/PPKS yang Terdata pada Tahun N x 100%		
		d) Manfaat : untuk mengetahui jumlah PMKS/PPKS yang Tertangani di Kabupaten Nganjuk		
		e) Cara Pengumpulan Data : Pendataan oleh Bidang PJRSK yang bekerjasama dengan Satpol PP, RSUD, Kepolisian dan Pemerintah Desa/ Kelurahan, serta TKSK		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Bulan		
	Persentase Jumlah PSKS yang Aktif	**a) Konsep :** Jumlah PSKS yang Aktif	Renja Dinas Sosial PPPA Tahun 2024	
		b) Definisi Operasional : Jumlah PSKS yang aktif yang ada di Kabupaten Nganjuk		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah PSKS yang Aktif : Jumlah PSKS yang Ada x 100%		
		d) Manfaat : Untuk Mengetahui Jumlah PSKS yang Aktif sehingga bagi PSKS yang Tidak Aktif dapat Dilakukan Pembinaan		

		e) Cara Pengumpulan Data : Pendataan oleh Bidang PSK melalui Pemerintah Desa/ Kelurahan		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Triwulan		
Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender	**a) Konsep :** Jumlah Lembaga Pemerintah yang Melaksanakan PUG	Renja Dinas Sosial PPPA Tahun 2024	
		b) Definisi Operasional : Jumlah Lembaga Pemerintah di Kabupaten Nganjuk yang Sudah Melaksanakan PUG		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Lembaga Pemerintah yang Melaksanakan PUG : Jumlah Lembaga yang Ada x 100%		
		d) Manfaat : Untuk Mengetahui Lembaga Pemerintah yang Sudah dan Belum Melaksanakan PUG, Untuk Dapat Dievaluasi		
		e) Cara Pengumpulan Data : Pendataan bagi Lembaga yang Sudah dan Belum Melaksanakan PUG oleh Bidang PP		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Triwulan		
	Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya	**a) Konsep :** Jumlah Kasus yang Tertangani pada Tahun N	Renja Dinas Sosial PPPA Tahun 2024	
		b) Definisi Operasional : Jumlah Kasus Tindak Kekerasan pada Anak dan Perempuan yang ada di Kabupaten Nganjuk		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan yang Terlaporkan : Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan yang Terdata x 100%		
		d) Manfaat : Untuk Mengetahui Data terkait Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan yang Datanya setiap Tahun Berubah dan pada Tahun 2023 Mengalami dibanding Tahun Sebelumnya, serta Membangun Kesadaran Masyarakat untuk Berani Melapor dan Meminimalisir Kekerasan		
		e) Cara Pengumpulan Data : Pendataan Berdasarkan Jenis Kasus yang Dilaporkan oleh Bidang PPA dan WCC		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Bulan		
	Skor Kabupaten Layak Anak	**a) Konsep :** Jumlah Skor Kabupaten Layak Anak	Renja Dinas Sosial PPPA Tahun 2024	
		b) Definisi Operasional : Jumlah Kenaikan Skor Kabupaten Layak Anak untuk Mencapai Kategori pada Masing-Masing Range Nilai		

		c) Formulasi Perhitungan : Menghitung Skor sesuai dengan Kategori yang Ada		
		d) Manfaat : Untuk Mengetahui Predikat Kabupaten Layak Anak setiap Tahunnya		
		e) Cara Pengumpulan Data : Memenuhi Permintaan Penilaian Predikat Kabupaten Layak Anak		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Triwulan		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2024-2026

1. PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2. JABATAN : SEKRETARIS DINAS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3. TUGAS : Memberikan Pelayanan Administratif dan Teknis yang Meliputi Perencanaan, Keuangan, Urusan Tata Usaha, Perlengkapan Rumah Tangga dan Urusan ASN kepada Semua Unsur di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. FUNGSI : 1). Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Program dan Anggaran
   2). Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan
   3). Pengelolaan Perlengkapan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah
   4). Pembinaan Aparatur
   5). Pengelolaan Urusan Kepegawaian
   6). Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Anggaran
   7). Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah
   8). Pembinaan dan Koordinasi Urusan Kepegawaian
   9). Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional
   10). Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungn Anak yang Berkaitan dengan Tugasnya

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Terpenuhi	**a) Konsep :** Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Persentase Dokumen atau Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan dalam 1 Tahun berjalan		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Dokumen atau Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang terpenuhi : Jumlah Dokumen atau Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang ada x 100%		
		d) Manfaat : Mengetahui Jumlah dan Jenis Dokumen atau Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang ada di Dinas Sosial PPPA		
		e) Cara Pengumpulan Data : Menyiapkan Dokumen atau Laporan		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Triwulan		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	**a) Konsep :** Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi Keuangan	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi Keuangan yang dilaksanakan dalam 1 Tahun berjalan		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Dokumen atau Laporan Administrasi Keuangan yang disusun : Jumlah Dokumen atau Laporan Administrasi Keuangan yang ada x 100%		
		d) Manfaat : Mengetahui Jumlah dan Jenis Dokumen atau Laporan Administrasi Keuangan yang disusun di Dinas Sosial PPPA		
		e) Cara Pengumpulan Data : Menyiapkan Dokumen atau Laporan Administrasi Keuangan		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Triwulan		
Administrasi Kepegawaian Perangkat	Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi	**a) Konsep :** Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi Kepegawaian	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	

Daerah	Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	**b) Definisi Operasional :** Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan dalam 1 Tahun berjalan		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Dokumen atau Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun : Jumlah Dokumen atau Laporan Administrasi Kepegawaian yang ada x 100%		
		d) Manfaat : Mengetahui Jumlah dan Jenis Dokumen atau Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun di Dinas Sosial PPPA		
		e) Cara Pengumpulan Data : Menyiapkan Dokumen atau Laporan Administrasi Kepegawaian		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Triwulan		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Paket atau Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	**a) Konsep :** Jumlah Persentase Paket atau Laporan Administrasi Umum	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Persentase Paket atau Laporan Administrasi Umum yang dilaksanakan dalam 1 Tahun berjalan		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Paket atau Laporan Administrasi Umum yang disusun : Jumlah Paket atau Laporan Administrasi Umum yang tersedia x 100%		
		d) Manfaat : Mengetahui Paket atau Laporan Administrasi Umum yang disusun di Dinas Sosial PPPA		
		e) Cara Pengumpulan Data : Menyiapkan Dokumen atau Laporan Administrasi Umum		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Triwulan		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Diadakan	**a) Konsep :** Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Diadakan yang dilaksanakan dalam 1 Tahun berjalan		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang diadakan : Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang ada x 100%		

		d) Manfaat : Mengetahui Jumlah dan Jenis Barang Milik Daerah SKPD yang di peroleh dari proses pengadaan di Dinas Sosial PPPA		
		e) Cara Pengumpulan Data : Menghitung Jumlah Barang yang Diperoleh dari ProsesPengadaan		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Triwulan 1		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	**a) Konsep :** Jumlah Persentase Jasa Penunjang	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia dalam 1 Tahun berjalan		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Jasa Penunjang Urusan tersedia : Jumlah Jasa Penunjang Urusan yang ada x 100%		
		d) Manfaat : Mengetahui Jumlah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia di Dinas Sosial PPPA		
		e) Cara Pengumpulan Data : Menyiapkan Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Triwulan		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Terawat	**a) Konsep :** Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Terawat yang dilaksanakan dalam 1 Tahun berjalan		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Barang Milik Daerah yang Terawat : Jumlah Barang Milik Daerah yang ada x 100%		
		d) Manfaat : Mengetahui Jumlah Barang Milik Daerah yang Terawat di Dinas Sosial PPPA		
		e) Cara Pengumpulan Data : Menyiapkan Barang Milik Daerah yang Akan Dilakukan Pemeliharaan		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Triwulan		

1. PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2. JABATAN : ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH DINAS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3. TUGAS : Melakukan Identifikasi, Inventarisasi, Pemutakhiran, dan Analisis Data serta Melakukan Analisis dan Penyajian Informasi, Menyusun Makalah, dan Melakukan Pemantauan dan Evaluasi serta Melakukan Kajian Teknis
4. FUNGSI : 1). Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan
2). Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungn Anak yang Berkaitan dengan Tugasnya

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**a) Konsep :** Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Jumlah ASN di Dinas Sosial PPPA yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dalam Periode 1 Tahun Berjalan		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Total ASN Dinas Sosial PPPA		
		d) Manfaat : Mengetahui Kebutuhan Anggaran Gaji dan Tunjangan yang Akan di Sediakan untuk ASN di Dinas Sosial PPPA		
		e) Cara Pengumpulan Data : Menyiapkan Dokumen atau Laporan		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Bulan		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**a) Konsep :** Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas ASN dalam Bentuk Kegiatan Senam dan Capacity Building yang dilaksanakan dalam 1 Tahun berjalan		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Dokumen yang Melaksanakan Tugas ASN		
		d) Manfaat : Mengetahui Jumlah dan Jenis Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		

		e) Cara Pengumpulan Data : Menyiapkan Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Bulan		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**a) Konsep :** Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun dalam 1 Tahun berjalan		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Hasil Koordinasi		
		d) Manfaat : Mengetahui Jumlah Laporan dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan yang Disusun		
		e) Cara Pengumpulan Data : Menyiapkan Laporan dan Hasil Koordinasi Laporan Keuangan Akhir Tahun		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Triwulan dan Akhir Tahun		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**a) Konsep :** Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Laporan Keuangan dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran yang disusun dalam 1 Tahun berjalan		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran dan Hasil Koordinasi		
		d) Manfaat : Mengetahui Jumlah Laporan dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan yang Disusun		
		e) Cara Pengumpulan Data : Menyiapkan Laporan dan Hasil Koordinasi Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Bulan, Triwulan, dan Semesteran		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	**a) Konsep :** Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	

		b) Definisi Operasional : Jumlah Kebutuhan Bahan Logistik Kantor yang disediakan dalam 1 Tahun berjalan		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Paket Bahan Logistik yang Tersedia		
		d) Manfaat : Mengetahui Jumlah Kebutuhan Paket Bahan Logistik yang ada di Dinas Sosial PPPA		
		e) Cara Pengumpulan Data : Menyiapkan Jenis Paket Bahan Logistik		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Bulan		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**a) Konsep :** Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan dalam 1 Tahun berjalan		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia		
		d) Manfaat : Mengetahui Kebutuhan Cetak dan Penggandaan yang ada di Dinas Sosial PPPA		
		e) Cara Pengumpulan Data : Menyiapkan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Bulan		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**a) Konsep :** Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Laporan terkait Kegiatan Mamin Tamu yang Disediakan oleh Dinas Sosial PPPA dalam Waktu 1 Tahun Berjalan		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Mamin Tamu yang Tersedia		
		d) Manfaat : Mengetahui Kebutuhan Mamin Tamu yang ada di Dinas Sosial PPPA		
		e) Cara Pengumpulan Data : Menyiapkan Mamin Tamu sesuai dengan Kebutuhan		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Bulan		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	**a) Konsep :** Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	

Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**b) Definisi Operasional :** Laporan terkait Kegiatan Mamin Rapat yang Disediakan oleh Dinas Sosial PPPA dalam Waktu 1 Tahun Berjalan		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Mamin Rapat yang Tersedia		
		d) Manfaat : Mengetahui Kebutuhan Mamin Rapat yang ada di Dinas Sosial PPPA		
		e) Cara Pengumpulan Data : Menyiapkan Mamin Rapat sesuai dengan Kebutuhan		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Bulan		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2024-2026

1. PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2. JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DINAS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3. TUGAS : Melakukan Identifikasi, Inventarisasi, Pemutakhiran, dan Analisis Data serta Melakukan Analisis dan Penyajian Informasi, Menyusun Makalah, dan Melakukan Pemantauan dan Evaluasi serta Melakukan Kajian Teknis
4. FUNGSI : 1). Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan
   2). Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungn Anak yang Berkaitan dengan Tugasnya

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**a) Konsep :** Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan Senam dan Capacity Building		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Pegawai baik ASN maupun THL		
		d) Manfaat : Mengetahui Jumlah Pegawai yang Mengikuti dan Tidak Mengikuti Senam maupun Capacity Building untuk Dijadikan Evaluasi Kedepannya		
		e) Cara Pengumpulan Data : Menyiapkan Data Jumlah Pegawai		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Bulan		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**a) Konsep :** Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Jumlah Kebutuhan Bahan Logistik Kantor yang disediakan dalam 1 Tahun berjalan		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Paket Bahan Logistik yang Tersedia		

		d) Manfaat : Mengetahui Jumlah Kebutuhan Paket Bahan Logistik yang ada di Dinas Sosial PPPA		
		e) Cara Pengumpulan Data : Menyiapkan Jenis Paket Bahan Logistik		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Bulan		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**a) Konsep :** Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Persentase Dokumen Bahan Bacaan yang Disediakan dalam Kurun Waktu 1 Tahun		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan yang Disediakan : Jumlah Target Dokumen Bahan Bacaan yang Disediakan x 100%		
		d) Manfaat : Mengetahui Jumlah dan Jenis Dokumen Bahan Bacaan yang Disediakan di Dinas Sosial PPPA		
		e) Cara Pengumpulan Data : Menyediakan Dokumen Bahan Bacaan yang Diadakan		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Bulan		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	**a) Konsep :** Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Persentase Paket Mebel yang Disediakan		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan : Jumlah Target Paket Mebel yang Tersedia x 100%		
		d) Manfaat : Mengidentifikasi Paket Mebel yang Disediakan di Dinas Sosial PPPA		
		e) Cara Pengumpulan Data : Menyediakan Paket Mebel yang Diperlukan		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Triwulan I		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	**a) Konsep :** Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Persentase Peralatan dan Mesin yang Disediakan		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Peralatan dan Mesin yang Disediakan : Jumlah Target Peralatan dan Mesin yang Tersedia x 100%		

		d) Manfaat : Mengidentifikasi Peralatan dan Mesin yang Disediakan di Dinas Sosial PPPA		
		e) Cara Pengumpulan Data : Menyediakan Peralatan dan Mesin yang Diperlukan		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Triwulan I		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**a) Konsep :** Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Persentase Surat Menyurat yang dilaksanakan dalam 1 Tahun berjalan		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Surat Menyurat yang dilaksanakan dalam Waktu 1 Tahun		
		d) Manfaat : Mengetahui Jumlah Surat Menyurat di Dinas Sosial PPPA		
		e) Cara Pengumpulan Data : Menghitung Jumlah Surat Menyurat		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Triwulan		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**a) Konsep :** Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Laporan yang Dilaksanakan : Jumlah Target Laporan yang Harus Terpenuhi x 100%		
		d) Manfaat : Mengidentifikasi Jumlah Pembayaran Telepon, PDAM, dan Listrik		
		e) Cara Pengumpulan Data : Memenuhi Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Bulan		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**a) Konsep :** Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dilaksanakan : Jumlah Target Laporan yang Harus Terpenuhi x 100%		

		d) Manfaat : Mengidentifikasi Jumlah Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor		
		e) Cara Pengumpulan Data : Memenuhi Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Bulan		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**a) Konsep :** Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Persentase Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dalam 1 Tahun berjalan		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya : Jumlah Kendaraan Dinas yang ada x 100%		
		d) Manfaat : Mengetahui Kendaraan Dinas yang Harus Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya di Dinas Sosial PPPA		
		e) Cara Pengumpulan Data : Mendata Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Triwulan		
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	**a) Konsep :** Jumlah Mebel yang Dipelihara	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Persentase Mebel yang Dipelihara dalam 1 Tahun berjalan		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Mebel yang Dipelihara : Jumlah Mebel yang ada x 100%		
		d) Manfaat : Mengetahui Mebel yang Memerlukan Pemeliharaan di Dinas Sosial PPPA		
		e) Cara Pengumpulan Data : Mengecek dan Mendata Mebel yang Memerlukan Pemeliharaan		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Triwulan		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**a) Konsep :** Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Persentase Peralatan dan Mesin yang Dipelihara dalam 1 Tahun berjalan		

		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara : Jumlah Peralatan dan Mesin yang ada x 100%		
		d) Manfaat : Mengetahui Peralatan dan Mesin yang Memerlukan Pemeliharaan di Dinas Sosial PPPA		
		e) Cara Pengumpulan Data : Mengecek dan Mendata Peralatan dan Mesin yang Memerlukan Pemeliharaan		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Triwulan		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**a) Konsep :** Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Persentase Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara dalam 1 Tahun berjalan		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang ada x 100%		
		d) Manfaat : Mengetahui Gedung Kantor dan Bangunan yang Memerlukan Pemeliharaan di Dinas Sosial PPPA		
		e) Cara Pengumpulan Data : Mengecek dan Mendata Gedung Kantor dan Bangunan yang Memerlukan Pemeliharaan		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Triwulan		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2024-2026

1. PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2. JABATAN : FUNGSIONAL UMUM DINAS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3. TUGAS : Memberikan Pelayanan Administratif dan Teknis yang Meliputi Perencanaan, Keuangan, Urusan Tata Usaha, Perlengkapan Rumah Tangga dan Urusan ASN kepada Semua Unsur di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. FUNGSI : 1). Pengelolaan Perlengkapan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah
   2). Pembinaan Aparatur
   3). Pengelolaan Urusan Kepegawaian
   4). Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah
   5). Pembinaan dan Koordinasi Urusan Kepegawaian
   6). Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional
   7). Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungn Anak yang Berkaitan dengan Tugasnya

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengelolaan Administrasi Surat Masuk	**a) Konsep :** Jumlah Pengelolaan Administrasi Surat Masuk	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Jumlah Surat Masuk dalam 1 Tahun		
		c) Formulasi Perhitungan : Mengarsipkan Jumlah Surat Masuk		
		d) Manfaat : Mengetahui Jumlah Surat Masuk dalam 1 Tahun		
		e) Cara Pengumpulan Data : Memilah antara Surat Masuk dan Surat Keluar		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Triwulan		
	Jumlah Pengelolaan Administrasi Surat Keluar	**a) Konsep :** Jumlah Pengelolaan Administrasi Surat Keluar	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Jumlah Surat Keluar dalam 1		

		Tahun		
		c) Formulasi Perhitungan : Mengarsipkan Jumlah Surat Keluar		
		d) Manfaat : Mengetahui Jumlah Surat Keluar dalam 1 Tahun		
		e) Cara Pengumpulan Data : Memilah antara Surat Masuk dan Surat Keluar		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Triwulan		
	Jumlah Pencatatan Agenda Kegiatan Dinas	**a) Konsep :** Jumlah Pencatatan Agenda Kegiatan Dinas	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Jumlah Agenda Kegiatan Dinas dalam 1 Tahun berjalan		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan		
		d) Manfaat : Mengetahui Agenda Apa Saja yang Dilaksanakan dalam 1 Tahun		
		e) Cara Pengumpulan Data : Mencatat Agenda Kegiatan yang Dilaksanakan		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Triwulan		
Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	**a) Konsep :** Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Jumlah Kendaraan yang Terbayar Pajaknya dalam Waktu 1 Tahun		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Kendaraan yang Terbayar Pajaknya		
		d) Manfaat : Pembayaran Pajak Kendaraan Tepat Waktu		
		e) Cara Pengumpulan Data : Mendata Kendaraan Berdasarkan Tanggal Lapor Pajak		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Triwulan		
	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	**a) Konsep :** Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Jumlah Kendaraan yang Memerlukan Pemeliharaan dalam Waktu 1 Tahun		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Kendaraan yang Terpelihara		
		d) Manfaat : Kendaraan Dinas Terpelihara dengan Baik		

		e) Cara Pengumpulan Data : Mendata Kendaraan yang Memerlukan Pemeliharaan		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Triwulan		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Dinas	**a) Konsep :** Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Dinas	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Jumlah Peralatan dan Mesin yang Memerlukan Pemeliharaan dalam Waktu 1 Tahun		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara		
		d) Manfaat : Peralatan dan Mesin Dinas Terpelihara dengan Baik		
		e) Cara Pengumpulan Data : Mendata Peralatan dan Mesin yang Memerlukan Pemeliharaan		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Triwulan		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel Dinas	**a) Konsep :** Jumlah Pemeliharaan Mebel Dinas	RKA Tahun 2024 Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Jumlah Mebel yang Memerlukan Pemeliharaan dalam Waktu 1 Tahun		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Mebel yang Terpelihara		
		d) Manfaat : Mebel Dinas Terpelihara dengan Baik		
		e) Cara Pengumpulan Data : Mendata Mebel yang Memerlukan Pemeliharaan		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Triwulan		
Terlaksananya Rekonsiliasi Aset Dinas	Jumlah Rekonsiliasi Aset Dinas	**a) Konsep :** Jumlah Rekonsiliasi Aset Dinas	Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Jumlah Rekonsiliasi Aset dalam Waktu 1 Tahun		
		c) Formulasi Perhitungan : Rekonsiliasi Aset yang Dilaksanakan Setiap Bulan		
		d) Manfaat : Mengetahui Kelebihan Kekurangan Aset pada Perangkat Daerah		
		e) Cara Pengumpulan Data : Menghimpun Data yang Diperlukan untuk Rekonsiliasi Aset		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Bulan		

Tersedianya Dokumen Pemeriksaan Fisik Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pemeriksaan Fisik Barang Milik Daerah	**a) Konsep :** Jumlah Dokumen Pemeriksaan Fisik Barang Milik Daerah	Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Jumlah Dokumen Pemeriksaan Fisik dalam Waktu 1 Tahun		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Dokumen Pemeriksaan Fisik yang Tersedia		
		d) Manfaat : Perangkat Daerah Mempunyai Arsip Dokumen Pemeriksaan Fisik		
		e) Cara Pengumpulan Data : Menyediakan Dokumen Pemeriksaan Fisik		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Triwulan		
Terlaksananya Pencatatan, Inventarisasi dan Penyimpanan Pengelolaan Barang Milik Negara	Jumlah Pencatatan, Inventarisasi dan Penyimpanan Pengelolaan Barang Milik Negara	**a) Konsep :** Jumlah Pencatatan, Inventarisasi dan Penyimpanan Pengelolaan Barang Milik Negara	Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Jumlah Pengelolaan Barang Milik Negara dalam Waktu 1 Tahun		
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Pencatatan, Inventarisasi dan Penyimpanan Barang		
		d) Manfaat : Mengetahui Jumlah Barang Milik Negara yang Terkelola		
		e) Cara Pengumpulan Data : Melakukan Pencatatan dan Inventarisasi Barang		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Triwulan		
Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui SimAset	Jumlah Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui SimAset	**a) Konsep :** Jumlah Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui SimAset	Dinas Sosial PPPA	
		b) Definisi Operasional : Jumlah Pengelolaan Barang Milik Daerah		
		c) Formulasi Perhitungan : Pendataan Barang Milik Daerah untuk di Input pada SimAset		
		d) Manfaat : Mengetahui Jumlah Barang Milik Daerah yang Terkelola		
		e) Cara Pengumpulan Data : Mendata Barang Milik Daerah		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Bulan		
Tersusunnya Dokumen Penyerahan Barang Milik	Jumlah Dokumen Penyerahan Barang Milik Negara kepada	**a) Konsep :** Jumlah Dokumen Penyerahan Barang Milik Negara kepada Pihak Lain	Dinas Sosial PPPA	

Negara kepada Pihak Lain	Pihak Lain	**b) Definisi Operasional :** Jumlah Dokumen Penyerahan Barang Milik Negara dalam Waktu 1 Tahun		
		c) Formulasi Perhitungan : Menyediakan Dokumen Penyerahan Barang Milik Negara		
		d) Manfaat : Dokumen Penyerahan Barang Milik Negara kepada Pihak Lain dapat Terdapat dan Terarsip dengan Baik		
		e) Cara Pengumpulan Data : Mendata Barang Milik Negara yang Diserahkan ke Pihak Lain		
		f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Triwulan		

FORMAT INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024-2026

1. PERANGKAT DAERAH : Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk
2. JABATAN : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan
3. TUGAS : Merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan kepahlawanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. FUNGSI :
   1. pelaksanaan kebijakan teknis Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan
   2. perumusan pedoman penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan
   3. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan
   4. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan
   5. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan
   6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
Pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah rekomendasi ijin pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	a) Konsep : Jumlah rekomendasi ijin pengumpulan sumbangan (UGB/PUB) b) Definisi Operasional : Jumlah Pemberian Rekomendasi Kepada Masyarakat c) Formulasi perhitungan : d) Manfaat : Untuk kelancaran UGB/PUB dan menghindari Penipuan e) Cara Pengumpulan Data Usulan dari yang mengadakan UGB/PUB f) Frekuensi waktu pengumpulan data ±3 bulan	RKA Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk	-

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemeliharan Taman Makam Pahlawan	a) Konsep : Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	RKA Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk	-
		b) Definisi Operasional : Jumlah Makam yang mendapatkan pemeliharaan kebersihan c) Formulasi perhitungan : Setiap hari d) Manfaat Terawatnya Taman Makam Pahlawan e) Cara Pengumpulan Data : Menghitung jumlah makam di TMP f) Frekuensi waktu pengumpulan data : 1 tahun sekali		
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabapaten /Kota	Jumlah orang yang mendapatkan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah Kabupaten/Kota	a) Konsep : Jumlah PSM yang mendapatkan pembinaan b) Definisi Operasional : Jumlah PSM yang mendapatkan pembinaan kemampuan potensi Pekerja Sosial Masyarakat c) Formulasi perhitungan : 1 X pembinaan d) Manfaat : Meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial bagi PSM e) Cara Pengumpulan Data : Melalui IPSM f) Frekuensi waktu pengumpulan data: 1 x setahun	RKA Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk	-
	Jumlah orang yang mendapatkan pengembangan	a) Konsep : Jumlah TKSK yang	RKA Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk	-

	potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah Kabupaten/Kota	mendapatkan pembinaan b) Definisi Operasional : Jumlah TKSK yang mendapatkan pembinaan sejumlah 20 Kecamatan		
		c) Formulasi perhitungan : 1 x pembinaan 1 satun d) Manfaat Penanganan PPKS e) Cara Pengumpulan Data Melalui PPKS f) Frekuensi waktu pengumpulan data 1 bulan 1 kali		
	Jumlah orang yang mendapatkan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah Kabupaten/Kota	a) Konsep : Jumlah Pengurus Karang Taruna yang mendapatkan pembinaan b) Definisi Operasional : Jumlah Pengurus Karang Taruna Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang mendapatkan pembinaan c) Formulasi perhitungan : 11 x pembinaan dalam 1 tahun d) Manfaat : Meningkatkan SDM Karang Taruna e) Cara Pengumpulan Data Melalui Karang Tararuna Kabupaten f) Frekuensi waktu pengumpulan data 1 tahun sekali	RKA Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk	-

FORMAT INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024-2026

1. PERANGKAT DAERAH : Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk
2. JABATAN : Penyuluh Sosial Ahli Muda
3. TUGAS :
   1. merancang kebijakan teknis Kepahlawanan, keperintisan, kejuangan
   2. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Kepahlawanan, keperintisan, kejuangan
   3. melaksanakan tugas di bidang Kepahlawanan, keperintisan, kejuangan
   4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang terpenuhi pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	a) Konsep : Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara b) Definisi Operasional : Jumlah Makam yang mendapatkan pemeliharaan kebersihan c) Formulasi perhitungan : Setiap hari d) Manfaat Terawatnya Taman Makam Pahlawan e) Cara Pengumpulan Data : Menghitung jumlah makam di TMP f) Frekuensi waktu pengumpulan data : 1 tahun sekali	RKA Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk	-

FORMAT INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024-2026

1. PERANGKAT DAERAH : Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk
2. JABATAN : Penyuluh Sosial Ahli Muda
3. TUGAS :
   1. merancang kebijakan teknis pengelolaan dan pemberdayaan sumber dana sosial
   2. melaksanakan urusan pemerintah dan pelayanan umum pengelolaan dan pemberdayaan sumber dana sosial
   3. melaksanakan tugas pelayanan pegelolaan dan pemberdayaan sumber dana sosial
   4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan ijin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan ijin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	a) Konsep : Jumlah dokumen dan rekomendasi ijin pengumpulan sumbangan (UGB/PUB) b) Definisi Operasional : Jumlah dokumen dan Pemberian Rekomendasi Kepada Masyarakat c) Formulasi perhitungan : d) Manfaat : Untuk kelancaran UGB/PUB dan menghindari Penipuan e) Cara Pengumpulan Data Usulan dari yang mengadakan UGB/PUB f) Frekuensi waktu pengumpulan data ±3 bulan	RKA Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk	-

FORMAT INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024-2026

1. PERANGKAT DAERAH : Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk
2. JABATAN : Penyuluh Sosial Ahli Muda
3. TUGAS :
   1. menyusun kebijakan teknis pemberdayaan perorangan, keluarga, masyarakat dan kelembagaan sosial
   2. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pemberdayaan perorangan dan keluarga, masyarakat dan kelembagaan sosial
   3. melaksanakan tugas pemberdayaan perorangan dan keluarga, masyarakat dan kelembagaan sosial
   4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
Peningkatan kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabapaten /Kota	Jumlah Orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	a) Konsep : Jumlah PSM yang mendapatkan pembinaan b) Definisi Operasional : Jumlah PSM yang mendapatkan pembinaan kemampuan potensi Pekerja Sosial Masyarakat c) Formulasi perhitungan : 1 X pembinaan d) Manfaat : Meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial bagi PSM e) Cara Pengumpulan Data : Melalui IPSM f) Frekuensi waktu pengumpulan data: 1 x setahun	RKA Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk	-

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabapaten /Kota	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasistasnya kewenangan Kabupaten/Kota	a) Konsep : Jumlah TKSK yang mendapatkan pembinaan b) Definisi Operasional : Jumlah TKSK yang mendapatkan pembinaan sejumlah 20 Kecamatan c) Formulasi perhitungan : 1 x pembinaan d) Manfaat Penanganan PPKS e) Cara Pengumpulan Data Melalui PPKS f) Frekuensi waktu pengumpulan data 1 bulan 1 kali	RKA Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk	-
Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabapaten / Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	a) Konsep : Jumlah Pengurus Karang Taruna yang mendapatkan pembinaan b) Definisi Operasional : Jumlah Pengurus Karang Taruna Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang mendapatkan pembinaan c) Formulasi perhitungan : 11 x pembinaan dalam 1 tahun d) Manfaat : Meningkatkan SDM Karang Taruna e) Cara Pengumpulan Data Melalui Karang Tararuna Kabupaten f) Frekuensi waktu pengumpulan data 1 tahun sekali	RKA Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk	-

FORMAT INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024-2026

1. PERANGKAT DAERAH : Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk
2. JABATAN : Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial
3. TUGAS :
   1. membantu menyusun kebijakan teknis pemberdayaan perorangan, keluarga, masyarakat dan kelembagaan sosial
   2. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pemberdayaan perorangan dan keluarga, masyarakat dan kelembagaan sosial
   3. melaksanakan tugas pemberdayaan perorangan dan keluarga, masyarakat dan kelembagaan sosial
   4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
Peningkatan kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabapaten /Kota	Jumlah Orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	a) Konsep : Jumlah PSM yang mendapatkan pembinaan b) Definisi Operasional : Jumlah PSM yang mendapatkan pembinaan kemampuan potensi Pekerja Sosial Masyarakat c) Formulasi perhitungan : 1 X pembinaan d) Manfaat : Meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial bagi PSM e) Cara Pengumpulan Data : Melalui IPSM f) Frekuensi waktu pengumpulan data: 1 x setahun	RKA Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk	-

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabapaten /Kota	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasistasnya kewenangan Kabupaten/Kota	a) Konsep : Jumlah TKSK yang mendapatkan pembinaan b) Definisi Operasional : Jumlah TKSK yang mendapatkan pembinaan sejumlah 20 Kecamatan c) Formulasi perhitungan : 1 x pembinaan d) Manfaat Penanganan PPKS e) Cara Pengumpulan Data Melalui PPKS f) Frekuensi waktu pengumpulan data 1 bulan 1 kali	RKA Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk	-
Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabapaten / Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	a) Konsep : Jumlah Pengurus Karang Taruna yang mendapatkan pembinaan b) Definisi Operasional : Jumlah Pengurus Karang Taruna Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang mendapatkan pembinaan c) Formulasi perhitungan : 11 x pembinaan dalam 1 tahun d) Manfaat : Meningkatkan SDM Karang Taruna e) Cara Pengumpulan Data Melalui Karang Tararuna Kabupaten f) Frekuensi waktu pengumpulan data 1 tahun sekali	RKA Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk	-

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
TAHUN 2024

1. Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
2. Tugas : Merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan yang meliputi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak.
3. Fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis program Pengarusutamaan Gender danPemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga,
      Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
   b. Perumusan pedoman teknis program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
   c. Pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan,
      Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
   d. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi kegiatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
   e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak ; dan
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	a) Konsep : PUG diperlukan sebagai alat utnuk menciptakan suatu strategi agar dapat mewujudkan pembangunan yang adil, efektif dan akuntabel oleh seluruhpenduduk baik laki-laki maupun perempuan. b) Definisi Operasional : memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai tahap perencanaan,pelaksanaan,pemantauan, evaluasi dariseluruh kebijakan, program di berbagai	DINAS SOSIAL, PPPA KABUPATEN NGANJUK	-

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
		bidang kehidupan. c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Anggaran PD yang di Gab GBS kan. d) Manfaat : Untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dn penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender. e) Cara Pengumpulan Data : Melalui Rapat Koordinasi dengan PD f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : 11 bulan		
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	a) Konsep : Memberikan sosialisasi kepada organisasi perempuan agar perempuan bisa menjadi peran aktif dalam kehidupan politik dan ekonomi b) Definisi Operasional : Melakukan pertemuan dengan organisasi kemasyarakatan c) Formulasi Perhitungan : Jumlah organisasi Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi d) Manfaat : Meningkatkan pengetahuan perempuan untuk menuju kesetaraan berpolitik. e) Cara Pengumpulan Data : Jumlah peserta yang hadir dibanding dengan jumlah yang diundang f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : 1 bulan	DINAS SOSIAL, PPPA KABUPATEN NGANJUK	-
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	a) Konsep : meningkatkan layanan Pemberdayaan Perempuan sesuai standart b) Definisi Operasional : Memberikan pendampingan dan KIE tentang layanan pemberdayaan perempuan	DINAS SOSIAL, PPPA KABUPATEN NGANJUK	

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
		c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Klien yang mendapatkan pendampingan sesuai prosedur d) Manfaat : Memberikan perlindungan terhadap klien e) Cara Pengumpulan Data : Jumlah kunjungan/Klien yang sudah di dampingi f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : 12 bulan		
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	g) Konsep : Memberikan advokasi dan pendampingan keluarga h) Definisi Operasional : Pengembangan kegiatan kemasyarakatan untuk mewujudkan kualitas keluarga i) Formulasi Perhitungan : Jumlah Organisasi kemasyarakatn yang mendapatkan advokasi j) Manfaat : Mewujudkan kualitas kelaurga yang berkeadilan dan berkesetaraan gender k) Cara Pengumpulan Data : l) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : 12 bulan	DINAS SOSIAL, PPPA KABUPATEN NGANJUK	-

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak diKabupaten	a) Konsep : Advokasi dan Pendapingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak b) Definisi Operasional : Memberikan pelayanan dan konseling keluarga melalui Puspaga dan jejaring c) Formulasi Perhitungan : Jumlah keluarga yang mendapatkan konseling dan pendampingan d) Manfaat : Untuk mewujudkan kesetaraangender dan hak anak e) Cara Pengumpulan Data : IKK mengikuti perhitungan di tingkat Provinsi f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : 12 bulan	DINAS SOSIAL, PPPA KABUPATEN NGANJUK	-
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	a) Konsep : Standart penyediaan layanan bagi keluarga melalui Puspaga dan WCC b) Definisi Operasional : Menyiapkan sarana prasarana dan SDM serta ketersedian bahan KIE c) Formulasi Perhitungan : Pemenuhan sesuai standart dan prosedur pelayanan d) Manfaat : Memberikan pelayanan yang komprehensif e) Cara Pengumpulan Data : Melalui data kunjungan klien f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : 12 bulan	DINAS SOSIAL, PPPA KABUPATEN NGANJUK	-
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat	Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah	a) Konsep : Penyusunan data profil gender setiap tahun b) Definisi Operasional : Membuat Profil Gender sesuai data riel yang	DINAS SOSIAL, PPPA KABUPATEN NGANJUK	-

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	dianalisa untuk dijadikan bahan pengambilan kebijakan di daerah c) Formulasi Perhitungan : Data tahun berjalan diabnding dengan data 23 tahun sebelumnya d) Manfaat : Untuk memberikan gambaran riel sesuai data tentang perkembangann pengarus utamaan gender. e) Cara Pengumpulan Data : Form data yang dikirimkan ke Perangkat Daerah sesuai Tugas Fungsi. f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : 12 bulan		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
TAHUN 2024

1. Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
2. Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
3. Tugas : Melaksanakan Kegiatan yang ada sesuai dengan tupoksi
4. Fungsi : a. melakukan peningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
   b. menyiapkan bahan penyusunan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak;
   c. melakukan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga;
   d. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi keluarga;
   e. melakukan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
   f. mengerjakan advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
   g. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
   h. melakukan peningkatkan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
   i. menyiapkan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
   j. menyiapkan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak;
   k. melakukan pembinaan dan pemberdayaan perempuan kepala keluarga (peka);
   l. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait peningkatan kualitas keluarga dan kesetaraan gender; dan
   m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	g) Konsep : Supaya mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota h) Definisi Operasional : Laporan Hasil Pelaksaan Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota i) Formulasi Perhitungan :	DINAS SOSIAL, PPPA KABUPATEN NGANJUK	

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Dapat dihitung dari Jumlah Perangkat Daerah yang menjadi peserta Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota j) Manfaat : Untuk Mewujudkan Peningkatan Kualitas Keluarga secara menyeluruh k) Cara Pengumpulan Data : Melalui banyaknya peserta Sosialisasi Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang hadir dalam kegiatan tersebut l) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Tribulan III		
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	a) Konsep : Adanya Sosialisasi tentang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia b) Definisi Operasional : Laporan Hasil Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia c) Formulasi Perhitungan : Dapat dihitung dari banyaknya Jumlah Peserta atau Partisipan Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga yang hadir d) Manfaat : Untuk Mewujudkan Peningkatan Kualitas Keluarga secara menyeluruh e) Cara Pengumpulan Data : Melalui banyaknya jumlah peserta atau partisipan Sosialisasi Lembaga yang Mendapatkan Sosialisasi Komunikasi,	DINAS SOSIAL, PPPA KABUPATEN NGANJUK	

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Informasi dan Edukasi (KIE) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga yang diundang f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Tribulan III		
Pengembangan Kegiatan masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	a) Konsep : Adanya Sosialisasi Pengembangan bagi masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota b) Definisi Operasional : Laporan Hasil Sosialisasi Pengembangan Kegiatan masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota c) Formulasi Perhitungan : Dapat dihitung dari banyaknya Lembaga yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan (KG) dan Hak Anak d) Manfaat : Untuk Mewujudkan Peningkatan Kualitas Keluarga secara menyeluruh e) Cara Pengumpulan Data : Melalui banyaknya Peserta atau Partisipan yang hadir dalam Sosialisasi Pengembangan Kegiatan masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Tribulan III	DINAS SOSIAL, PPPA KABUPATEN NGANJUK	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan	a) Konsep : Adanya Sosialisasi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan b) Definisi Operasional : Laporan Hasil Sosialisasi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan c) Formulasi Perhitungan : Dapat dihitung dari banyaknya Jumlah	DINAS SOSIAL, PPPA KABUPATEN NGANJUK	

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang berpartisipasi d) Manfaat : Untuk Mewujudkan Peningkatan Kualitas Keluarga secara menyeluruh e) Cara Pengumpulan Data : Melalui banyaknya Peserta Sosialisasi atau Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang hadir f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Tribulan IV		
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	a) Konsep : Adanya Sosialisasi Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota b) Laporan Hasil Sosialisasi Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota c) Formulasi Perhitungan : Dapat dihitung dari banyaknya Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang berpartisipasi d) Manfaat : Untuk Mewujudkan Peningkatan Kualitas Keluarga secara menyeluruh e) Cara Pengumpulan Data : Melalui banyaknya Peserta Sosialisasi atau Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang hadir f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Tribulan II	DINAS SOSIAL, PPPA KABUPATEN NGANJUK	
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	a) Konsep : Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga		

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan serta kepedulian dan peran serta perempuan dalam upaya untuk meningkatkan ekonomi perempuan. b) Definisi Operasional : Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dapat melalui kegiatan Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) c) Formulasi Perhitungan : Dapat dihitung dari banyaknya Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang berpartisipasi d) Manfaat : Untuk Mewujudkan Peningkatan Kualitas Keluarga secara menyeluruh e) Cara Pengumpulan Data : Melalui banyaknya Peserta Sosialisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang hadir f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Tribulan II		
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	a) Konsep : Adanya Layanan Komprehensif bagi Keluarga yang mempunyai permasalahan keluarga dan mendapat pelayanan di Puspaga Kabupaten Nganjuk a) Definisi Operasional : Layanan Komprehensif bagi Keluarga yang dimaksud adalah Layanan melalui Konseling dan Sosialisasi terkait dengan Permasalahan pada Keluarga yang dilaksanakan di Puspaga Kabupaten Nganjuk b) Formulasi Perhitungan : Dihitung dari banyaknya Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak	DINAS SOSIAL, PPPA KABUPATEN NGANJUK	

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
		c) Manfaat : Agar Masyarakat Mendapatkan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak d) Cara Pengumpulan Data : Melalui banyaknya Layanan atau Klien yang datang ke Puspaga Kabupaten Nganjuk e) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : 12 bulan		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
TAHUN 2024

5. Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
6. Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
7. Tugas : Melaksanakan Kegiatan yang ada sesuai dengan tupoksi
8. Fungsi : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sistem informasi dan data gender dan anak;
   b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis sistem informasi dan data gender dan anak;
   c. melaksanakan kegiatan mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data gender dan anak dalam kelembagaan data;
   d. menyediakan data gender dan anak;
   e. menyajikan dan memanfaatkan data gender dan anak dalam kelembagaan data;
   f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan data gender dan anak; dan
   g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	m) Konsep : Agar meningkatnya peran serta perempuan dalam segala aspek pembangunan n) Definisi Operasional : Dokumen Data Gender dan Anak merupakan dasar penyusunan perencanaan,kebijakan dan program guna mengurangi kesenjangan gender o) Formulasi Perhitungan : Dapat dihitung dari banyaknya Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia p) Manfaat : Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender q) Cara Pengumpulan Data : Melalui OPD yang mengumpulkan Data Gender dan Anak r) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data :	DINAS SOSIAL, PPPA KABUPATEN NGANJUK	-

NO	SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
			12 bulan		
2.	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	a) Konsep : Sebagai langkah mengurangi kesenjangan gender b) Definisi Operasional : Adanya Dokumen dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan pimpinan c) Formulasi Perhitungan : Dapat dihitung dari Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota d) Manfaat : Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender e) Cara Pengumpulan Data : Melalui Sosialisasi dan Pengumpulan Data OPD f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : 12 bulan	DINAS SOSIAL, PPPA KABUPATEN NGANJUK	-
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	a) Konsep : PUG diperlukan sebagai alat untuk menciptakan suatu strategi agar dapat mewujudkan pembangunan yang adil, efektif dan akuntabel oleh seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan. b) Definisi Operasional : memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai tahap perencanaan,pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dariseluruh	DINAS SOSIAL, PPPA KABUPATEN NGANJUK	

NO	SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
			kebijakan, program di berbagai bidang kehidupan. c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Anggaran PD yang di Gab GBS kan. d) Manfaat : Untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dn penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender. e) Cara Pengumpulan Data : Melalui Rapat Koordinasi dengan PD f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : 11 bulan		
4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan termasuk PPRG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	a) Konsep : PUG diperlukan sebagai alat untuk menciptakan suatu strategi agar dapat mewujudkan pembangunan yang adil, efektif dan akuntabel oleh seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan. b) Definisi Operasional : memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai tahap perencanaan, pelaksanaan ,pemantauan, evaluasi dariseluruh kebijakan, program di berbagai bidang kehidupan. c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Anggaran PD yang di Gab GBS kan. d) Manfaat : Untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dn penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender. e) Cara Pengumpulan Data : Melalui Rapat Koordinasi dengan PD f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : 11 bulan	DINAS SOSIAL, PPPA KABUPATEN NGANJUK	

NO	SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
5.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	a) Konsep : PUG diperlukan sebagai alat untuk menciptakan suatu strategi agar dapat mewujudkan pembangunan yang adil, efektif dan akuntabel oleh seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan. b) Definisi Operasional : memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai tahap perencanaan, pelaksanaan ,pemantauan, evaluasi dariseluruh kebijakan, program di berbagai bidang kehidupan. c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Anggaran PD yang di Gab GBS kan. d) Manfaat : Untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dn penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender. e) Cara Pengumpulan Data : Melalui Rapat Koordinasi dengan PD f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : 11 bulan	DINAS SOSIAL, PPPA KABUPATEN NGANJUK	
6.	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	a) Konsep : PUG diperlukan sebagai alat untuk menciptakan suatu strategi agar dapat mewujudkan pembangunan yang adil, efektif dan akuntabel oleh seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan. b) Definisi Operasional : memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai tahap perencanaan, pelaksanaan ,pemantauan, evaluasi dariseluruh kebijakan, program di berbagai bidang kehidupan. c) Formulasi Perhitungan : Jumlah	DINAS SOSIAL, PPPA KABUPATEN NGANJUK	

NO	SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
			Anggaran PD yang di Gab GBS kan. d) Manfaat : Untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dn penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender. e) Cara Pengumpulan Data : Melalui Rapat Koordinasi dengan PD f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : 11 bulan		
7.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Kewenangan Kabupaten/Kota	g) Konsep : Memberikan sosialisasi kepada organisasi perempuan agar perempuan bisa menjadi peran aktif dalam kehidupan politik dan ekonomi h) Definisi Operasional : Melakukan pertemuan dengan organisasi kemasyarakatan i) Formulasi Perhitungan : Jumlah organisasi Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi j) Manfaat : Meningkatkan pengetahuan perempuan untuk menuju kesetaraan berpolitik. k) Cara Pengumpulan Data : Jumlah peserta yang hadir dibanding dengan jumlah yang diundang l) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : 1 bulan	DINAS SOSIAL, PPPA KABUPATEN NGANJUK	
8.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	a) Konsep : Memberikan sosialisasi kepada organisasi perempuan agar perempuan bisa menjadi peran aktif dalam kehidupan politik dan ekonomi b) Definisi Operasional : Melakukan pertemuan dengan organisasi kemasyarakatan c) Formulasi Perhitungan : Jumlah organisasi Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi	DINAS SOSIAL, PPPA KABUPATEN NGANJUK	

NO	SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
			d) Manfaat : Meningkatkan pengetahuan perempuan untuk menuju kesetaraan berpolitik. e) Cara Pengumpulan Data : Jumlah peserta yang hadir dibanding dengan jumlah yang diundang f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : 1 bulan		
9.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	a) Konsep : meningkatkan layanan Pemberdayaan Perempuan sesuai standart b) Definisi Operasional : Memberikan pendampingan dan KIE tentang layanan pemberdayaan perempuan c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Klien yang mendapatkan pendampingan sesuai prosedur d) Manfaat : Memberikan perlindungan terhadap klien e) Cara Pengumpulan Data : Jumlah kunjungan/Klien yang sudah di dampingi f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : 12 bulan	DINAS SOSIAL, PPPA KABUPATEN NGANJUK	
10.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat Peningkatan Kapasitas	m) Konsep : meningkatkan layanan Pemberdayaan Perempuan sesuai standart n) Definisi Operasional : Memberikan pendampingan dan KIE tentang layanan pemberdayaan perempuan o) Formulasi Perhitungan : Jumlah Klien yang mendapatkan pendampingan sesuai prosedur p) Manfaat : Memberikan perlindungan terhadap klien q) Cara Pengumpulan Data : Jumlah kunjungan/Klien yang sudah di dampingi	DINAS SOSIAL, PPPA KABUPATEN NGANJUK	

NO	SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
			r) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : 12 bulan		
11.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	a) Konsep : meningkatkan layanan Pemberdayaan Perempuan sesuai standart b) Definisi Operasional : Memberikan pendampingan dan KIE tentang layanan pemberdayaan perempuan c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Klien yang mendapatkan pendampingan sesuai prosedur d) Manfaat : Memberikan perlindungan terhadap klien e) Cara Pengumpulan Data : Jumlah kunjungan/Klien yang sudah di dampingi f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : 12 bulan	DINAS SOSIAL, PPPA KABUPATEN NGANJUK	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024-2026

1 PERANGKAT DAERA : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 JABATAN : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
3 TUGAS : Merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pengarusutamaan hak anak
4 FUNGSI : 1. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pengarusutamaan hak anak
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pengarusutamaan hak anak
3. Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pengarusutamaan hak anak
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan percepatan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PHA) sesuai amanat konvensi hak anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tugasnya

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN
1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani (100%)	a. Konsep	: Prosentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	- Bidang PPA - WCC - unit PPA Polres	
		b. Definisi Operasional	: Prosentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani		
		c. Formula penghitungan	: Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani dibagi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan		
		d. Manfaat	: Bahan analisa untuk mencari strategi penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan		
		e. Cara pengumpulan data	: Mengkompilasi data jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan pengaduan		
		f. Frekuensi waktu pengumpulan data	: tribulanan		
2. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten kota	Jumlah layanan rujukan yang ditangani (100%)	a. Konsep :	: Prosentase layanan rujukan yang ditangani	- Bidang PPA - WCC - unit PPA Polres	
		b. Definisi Operasional	: Prosentase layanan rujukan yang ditangani		
		c. Formula penghitungan	: Jumlah layanan rujukan yang ditangani dibagi jumlah layanan rujukan		
		d. Manfaat	: Optimalisasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan		
		e. Cara pengumpulan data	: Menghitung jumlah kegiatan dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga Penyedia Layanan Perlindungan perempuan		
		f. Frekuensi waktu pengumpulan data	: tribulanan		

SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN			SUMBER DATA	KETERANGAN
3	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan (100%)	a. Konsep :	:	Prosentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	- Bidang PPA	
			b. Definisi Operasional	:	Prosentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan		
			c. Formula penghitungan	:	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan dibagi Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan		
			d. Manfaat	:	Optimalisasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan		
			e. Cara pengumpulan data	:	menginventarisasi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan		
			f. Frekuensi waktu pengumpulan data	:	tahunan		
4	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kegiatan pelembagaan PHA (100%)	a. Konsep :	:	Jumlah kegiatan pelembagaan PHA	- Bidang PPA	
			b. Definisi Operasional	:	Jumlah kegiatan pelembagaan PHA		
			c. Formula penghitungan	:	Jumlah kegiatan pelembagaan PHA		
			d. Manfaat	:	Optimalisasi peran pelembagaan PHA dalam mendukung Kabupaten Layak Anak		
			e. Cara pengumpulan data	:	menginventarisasi kegiatan pelembagaan PHA		
			f. pengumpulan data	:	tahunan		
5	Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia Layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kecamatan yang menyediakan layanan peningkatan kualitas hidup anak (100%)	a. Konsep :	:	Prosentase kecamatan yang menyediakan layanan peningkatan kualitas hidup anak	- Bidang PPA	
			b. Definisi Operasional	:	Prosentase kecamatan yang menyediakan layanan peningkatan kualitas hidup anak		
			c. Formula penghitungan	:	Jumlah kecamatan yang menyediakan layanan peningkatan kualitas hidup anak dibagi jumlah seluruh kecamatan di kabupaten Nganjuk		
			d. Manfaat	:	Pengembangan kecamatan layak anak dalam mendukung Kabupaten Layak Anak		
			e. Cara pengumpulan data	:	menginvetarisasi kecamatan yang menyediakan layanan peningkatan kualitas hidup anak		
			f. Frekuensi waktu pengumpulan data	:	tahunan		

SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN			SUMBER DATA	KETERANGAN
6	Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani (100%)	a. Konsep :	:	Prosentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani	- Bidang PPA - WCC - unit PPA Polres	
			b. Definisi Operasional	:	Prosentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani		
			c. Formula penghitungan	:	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani dibagi Jumlah kasus kekerasan terhadap anak		
			d. Manfaat	:	Bahan analisa untuk mencari strategi penurunan kasus kekerasan terhadap anak		
			e. Cara pengumpulan data	:	Mengkompilasi data Jumlah kasus kekerasan terhadap anak		
			f. Frekuensi waktu pengumpulan data	:	tribulanan		
7	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten/kota	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan perlindungan khusus anak (100%)	a. Konsep :	:	Prosentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan perlindungan khusus anak	- Bidang PPA - WCC - unit PPA Polres	
			b. Definisi Operasional	:	Prosentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan perlindungan khusus anak		
			c. Formula penghitungan	:	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan perlindungan khusus anak dibagi jumlah anak korban kekerasan		
			d. Manfaat	:	Optimalisasi penanganan kasus kekerasan terhadap anak		
			e. Cara pengumpulan data	:	Mengkompilasi Jumlah anak korban kekerasan		
			f. Frekuensi waktu pengumpulan data	:	tribulanan		
8	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil kegiatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (100%)	a. Konsep :	:	Jumlah laporan hasil kegiatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	- Bidang PPA	
			b. Definisi Operasional	:	Jumlah laporan hasil kegiatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus		
			c. Formula penghitungan	:	Jumlah laporan hasil kegiatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus		
			d. Manfaat	:	Pengembangan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus		
			e. Cara pengumpulan data	:	Mengidentifikasi laporan hasil kegiatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus		
			f. Frekuensi waktu pengumpulan data	:	tribulanan		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024-2026

1 PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 JABATAN : Analis Kebijakan Ahli Muda
3 TUGAS : Merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Perlindungan khusus anak
4 FUNGSI : 1. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan khusus anak
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perlindungan khusus anak
3. Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan khusus
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tugasnya

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN
1. Penguatan jejaring antar lembaga Penyedia layanan Perlindungan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan hasil kegiatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	a. Konsep	: Jumlah Laporan hasil kegiatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	- Bidang PPA	
		b. Definisi Operasional	: Jumlah Laporan hasil kegiatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	- WCC	
		c. Formula penghitungan	: Jumlah laporan hasil kegiatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	- unit PPA Polres	
		d. Manfaat	: Pengembangan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus		
		e. Cara pengumpulan data	: Mengidentifikasi laporan hasil kegiatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus		
		f. Frekuensi waktu pengumpulan data	: tribulanan		
2 Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani	a. Konsep :	: Prosentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani	- Bidang PPA	
		b. Definisi Operasional	: Prosentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani	- WCC	

SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN
	Kewenangan Kabupaten/Kota		c. Formula penghitungan	: Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani dibagi Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	- unit PPA Polres	
			d. Manfaat	: Bahan analisa untuk mencari strategi penurunan kasus kekerasan terhadap anak		
			e. Cara pengumpulan data	: Mengkompilasi data Jumlah kasus kekerasan terhadap anak		
			f. Frekuensi waktu pengumpulan data	: tribulanan		
3	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kabupaten/kota	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan perlindungan khusus anak	a. Konsep :	: Prosentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan perlindungan khusus anak	- Bidang PPA	
			b. Definisi Operasional	: Prosentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan perlindungan khusus anak	- WCC	
			c. Formula penghitungan	: Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan perlindungan khusus anak dibagi jumlah anak korban kekerasan	- unit PPA Polres	
			d. Manfaat	: Optimalisasi penanganan kasus kekerasan terhadap anak		
			e. Cara pengumpulan data	: Mengkompilasi Jumlah anak korban kekerasan		
			f. Frekuensi waktu pengumpulan data	: tribulanan		
4	Koordinasi pelaksanaan layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan singkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	a. Konsep :	: Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yg memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi AMPK	- Bidang PPA	
			b. Definisi Operasional	: Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yg memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi AMPK	- WCC	
			c. Formula penghitungan	: Jumlah kasus yang ditangani dibagi Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	- unit PPA Polres	
			d. Manfaat	: Pengembangan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus		
			e. Cara pengumpulan data	: Mengidentifikasi laporan hasil kegiatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus		
			f. Frekuensi waktu pengumpulan data	: tribulanan		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024-2026

1 PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 JABATAN : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR KASI PEMENUHAN HAK ANAK
3 TUGAS : Membantu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pemenuhan Hak Anak.
4 FUNGSI : 1. Perumusan Kebijakan Teknis program kegiatan Pemenuhan Hak Anak
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pengawasan program dan kegiatan Pemenuhan hak Anak
3. Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi Program kegiatan PHA,
4. Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan pelaksanaan tugas program dan kegiatan PHA
6. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat daerah kabupaten/Kota Kewenangan
5. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan PHA
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan percepatan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PHA) sesuai amanat konvensi hak anak daN peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tugasnya

SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Aanak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	a. Konsep :	: Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah,Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	- Bidang PPA	
			b. Definisi Operasional	: Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah,Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	- Satgas KLA	

			c. Formula penghitungan	:	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah,Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	-Media	
			d. Manfaat	:	Terwujudnya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan	- Dunia Usaha	
			e. Cara pengumpulan data	:	Organisasi Pemerintah,Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi	- WCC	
			f. Frekuensi waktu pengumpulan data	:	tahunan		
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenagan Kabupaten/Kota	a. Konsep :	:	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupten/Kota	- Bidang PPA	
			b. Definisi Operasional	:	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupten/Kota	- Satgas KLA	
			c. Formula penghitungan	:	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupten/Kota	-Media	
			d. Manfaat	:	Optimalisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dalam mendukung Kabupaten Layak Anak	- Dunia Usaha	
			e. Cara pengumpulan data	:	menginventarisasi kegiatan pelembagaan PHA	- WCC	
			f. Frekuensi waktu pengumpulan data	:	tahunan		
3	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenagan	a. Konsep :	:	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan kabupaten/Kota	- Bidang PPA	

	Kewenangan Kabupaten/Kota	kabupaten/Kota	b. Definisi Operasional	:	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan kabupaten/Kota	- Satgas KLA	
			c. Formula penghitungan	:	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan kabupaten/Kota	-Media	
			d. Manfaat	:	Optimalisasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak dalam rangka Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak mendukung Kabupaten Layak Anak	- Dunia Usaha	
			e. Cara pengumpulan data	:	Menghitung Jumlah Anak yang mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan kabupaten/Kota	- WCC	
			f. Frekuensi waktu pengumpulan data	:	tahunan		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024-2026

1 PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 JABATAN : PELAKSANA PENGADMINISTRASI PENGANGKATAN DAN PENGAKUAN HAK ANAK
3 TUGAS : Melaksanakan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pengarusutamaan hak anak
4 FUNGSI : 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan percepatan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PHA) sesuai amanat konvensi hak anak dan peratura perundang-undangan yang berlaku
2. Melaksanakan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Pelaksanaan Tugas Yang mendukung Capaian Kinerja Dinas Sosial, PPPA
4. Pelaksanaan Laporan Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN

SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kegiatan pelembagaan PHA (100%)	a. Konsep :	: Jumlah kegiatan pelembagaan PHA	- Bidang PPA	
			b. Definisi Operasional	: Jumlah kegiatan pelembagaan PHA		
			c. Formula penghitungan	: Jumlah kegiatan pelembagaan PHA		
			d. Manfaat	: Optimalisasi peran pelembagaan PHA dalam mendukung Kabupaten Layak Anak		
			e. Cara pengumpulan data	: menginventarisasi kegiatan pelembagaan PHA		
			f. Frekuensi waktu pengumpulan data	: tahunan		
2	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	Melaksanakan pengajuan SPP dan laporan keuangan	a. Konsep :	: Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Sekretariat	
			b. Definisi Operasional	: Jumlah Dokumen Laporan Keuangan		
			c. Formula penghitungan	: Jumlah Dokumen Laporan Keuangan		
			d. Manfaat	: Optimalisasi Laporan Keuangan Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk		
			e. Cara pengumpulan data	: menginventarisasi SPJ dan Laporan Keuangan		
			f. Frekuensi waktu pengumpulan data	: tahunan, tribulan, dan bulanan		

3	Terlaksananya Tugas Yang mendukung Capaian Kinerja Dinas Sosial, PPPA	Melaksanakan tugas kegiatanyang mendukung Capaian Kinerja Dinas Sosial, PPPA	a. Konsep :	: Jumlah kegiatan pelembagaan PHA	- Bidang PPA	
			b. Definisi Operasional	: Jumlah kegiatan pelembagaan PHA		
			c. Formula penghitungan	: Jumlah kegiatan pelembagaan PHA		
			d. Manfaat	: Optimalisasi peran pelembagaan PHA dalam mendukung Kabupaten Layak Anak		
			e. Cara pengumpulan data	: menginventarisasi kegiatan pelembagaan PHA		
			f. Frekuensi waktu pengumpulan	: tahunan		
4	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Melaksanakan jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	a. Konsep :	: Jumalah ASN di Dinas Sosial PPPA Kab.	Sekretariat	
			b. Definisi Operasional	: Jumalah ASN di Dinas Sosial PPPA Kab.		
			c. Formula penghitungan	: Jumalah ASN di Dinas Sosial PPPA Kab.		
			d. Manfaat	: Optimalisasi peran laporan penerimaan gaji dan tunjangan ASN setiap bulannya		
			e. Cara pengumpulan data	: menginventarisasi Laporan Gaji dan Tunjangan		
			f. Frekuensi waktu pengumpulan data	: Bulanan		

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN NGANJUK

Drs. DARMANTONO
Pembina Tingkat I
NIP. 19680421 199403 1 010